

Jangan Biarkan Polri Menanggung Dosa Sendirian



Citra Polri meningkat signifikan dari angka 49% pada Oktober 2022 menjadi 62% pada Mei 2023 (Litbang Kompas). Saya adalah salah satu yang percaya hasil survei Litbang Kompas tersebut.

Pengalaman bersentuhan langsung dengan polisi, bermula ketika bertugas di awal-awal KPK berdiri. Persepsi negatif ada di kepala ketika mulai bekerjasama dengan anggota Polri. Seiring waktu berjalan, komunikasi dengan banyak anggota Polri semakin intensif. Persepsi awal anggota Polri banyak yang bodoh, korup, maunya menang sendiri mulai runtuh secara bertahap ketika bersentuhan langsung dengan mereka.

Kerjasama pertama dengan anggota Polri adalah dengan Dr. Akhmad Wiyagus (saat ini Kapolda Jabar). Seorang pembelajar yang baik, open mind (mau bekerjasama dan mau menerima pendapat orang lain), berani, dan juga sederhana. Kesaksian saya ini dapat dilihat di link detik.com berikut ini.

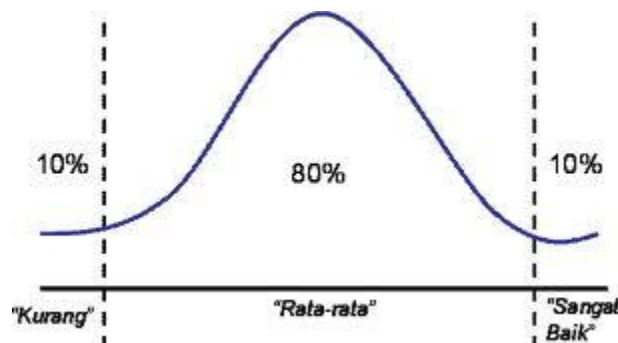
Selanjutnya kerjasama berlanjut dengan anggota Polri lain yang juga punya kecerdasan di atas rata-rata, punya komitmen tinggi dalam menjalankan tugas, dan sangat nyaman dalam berdiskusi dan bekerja sama.

Pengalaman ketika ditilang polisi, diperiksa polisi, dan mengurus surat-surat di Polsek, Polres, dan Polda belum pernah mengalami kesulitan. Pengalaman terakhir ketika ikut vaksin di sebuah pos polisi menunjukkan citra Polri yang sangat ramah dan melayani masyarakat.

Lalu bagaimana dengan anggota Polri seperti Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, dan kawan-kawan?

Vonis mati Sambo dan vonis penjara seumur hidup Teddy Minahasa Putra semakin menambah citra negatif Polri. Rekening gendut dan gaya hidup mewah Polisi dan anggota keluarganya, Mafia Judi yang dibekingi petinggi Polri, penyimpangan dalam penanganan barang bukti narkoba, dan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polri di daerah-daerah semakin menambah citra negatif Polri..

Kurva normal menempatkan mayoritas manusia di bagian tengah dalam kaitan dengan karakteristik tertentu. Sangat sedikit (+ 10%) yang berada di bagian kiri dan kanan.



Sumber: widianawuls.wordpress.com

Berdasarkan gambar di atas ditambah pengalaman bekerja di instansi pemerintah, swasta, dan BUMN, secara umum perilaku manusia terbagi ke dalam tiga bagian. Lebih kurang 10% merupakan pegawai dengan perilaku menyimpang termasuk yang melakukan kecurangan, koruptif, dan perilaku menyimpang lainnya. Sebaliknya ada juga pegawai dengan jumlah kurang lebih sekitar 10% mempunyai perilaku terbaik. Di antara kedua kubu tersebut, mayoritas pegawai adalah mayoritas dengan perilaku wajar dan kinerjanya sedang-sedang saja.

Demikian juga dengan Polri. Kurang lebih 10% merupakan anggota Polri yang bagus seperti Irijen Dr. Akhmad Wiyagus dan 10% merupakan anggota Polri seperti Irijen Ferdy Sambo dan Irijen Teddy Minahasa. Sedangkan mayoritas anggota Polri bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Apakah mayoritas anggota Polri (80% sebagaimana grafik di atas) juga berpotensi melakukan penyimpangan?

Sebagian besar dari pembaca kemungkinan akan menjawab "Iya". Demikian juga dengan penulis. Mengapa demikian?

Kita sudah sering mendengar pendapat Lord Acton (1834-1902) yang menyatakan: "The Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely". Polri mempunyai kewenangan (power) yang luar biasa. Kecenderungan untuk menyalahgunakan kewenangan pun kemungkinan juga sangat besar.

Akar masalah korupsi adalah adanya kesempatan (*opportunity*) ditambah adanya niat jahat. Untuk menyelesaikan masalah korupsi yang dilakukan anggota Polri, maka kesempatan untuk melakukan korupsi harus ditutup serapat mungkin.

Pendekatan “carrots and sticks” merupakan pendekatan paling populer untuk memberantas korupsi anggota Polri. Berikan penghasilan yang layak, yang istilahnya Kwin Kian Gie bisa hidup “gagah”, baru berikan sanksi terberat jika ada anggota Polri yang menyalahgunakan kewenangannya.

Gaji tertinggi Polri adalah sebesar Rp 5.930.800,- ditambah tunjangan kinerja sebesar Rp 34.902.000,- sama dengan 40 jutaan. Sedangkan penghasilan anggota Polri dengan pangkat paling rendah sekitar 5 jutaan (lihat artikel kompas berikut ini). Sebagai perbandingan, UMR DKI Jakarta Tahun 2023 sebesar Rp4,9 juta. Artinya anggota Polri digaji hampir sama dengan UMR DKI Jakarta.

Dengan penghasilan seperti di atas, bagaimana seorang anggota Polri bisa hidup “gagah” dan tidak tergoda untuk menyalahgunakan kewenangan (power)-nya? Bagaimana Kapolri bisa menindak tegas (sticks) anak buahnya ketika Kapolri tidak memberikan penghasilan (carrots) kepada mereka?

Jangan berharap Polri bisa bekerja profesional ketika negara tidak bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Jangan harap negara dapat menghilangkan “Sambo-Sambo” di tubuh Polri, ketika negara tidak dapat menutup “opportunity” (membangun sistem yang baik). Dan jangan terlalu berharap muncul “Hoegeng-Hoegeng” baru di tubuh Polri ketika tidak ada sistem penggajian yang baik.

Apakah situasi seperti ini akan dibiarkan terus-menerus, seolah-olah tidak ada masalah di tubuh Polri? Jangan biarkan anggota Polri menanggung dosa sendirian akibat kondisi untuk membuat dosa tersebut (opportunity) mudah dilakukan. Mirisnya seolah-olah “dosa berjamaah” tersebut “terpaksa dibiarkan” oleh negara akibat keterbatasan anggaran.

Coba bayangkan: di satu sisi anggota Polri mempunyai power besar, kesempatan untuk menyalahgunakan besar, di sisi lain, mereka juga punya kebutuhan besar untuk dapat hidup “gagah”. Kesempatan untuk membuat dosa dengan menerima gratifikasi begitu terbuka. Sebagian anggota polri terpaksa berani menanggung “dosa” tersebut. Ketika kondisi terdesak, yang haram pun bisa menjadi halal. Begitu mungkin pembenaran oleh mereka yang terpaksa menanggung “dosa” tersebut.

Sekali lagi, apakah kondisi ini dibiarkan saja? Siapa sebenarnya yang paling berdosa dengan kondisi ini?

Untuk menutup "dosa" tersebut sebenarnya relatif mudah. Contoh saja KPK yang sudah membangun sistem penggajian yang baik, sehingga pernah sangat dipercaya publik karena kinerjanya yang bagus. Ketika Polri dan Kejaksaan Agung sudah mempunyai tingkat kepercayaan dan bahkan kinerja yang lebih bagus dari KPK, sudah sewajarnya jika sistem penggajiannya, sebagai salah satu cara untuk memperbaiki sistem (menutup opportunity), juga diperbaiki. Dengan demikian negara tidak ikut menanggung "dosa" anggota Polri.

Siapun calon Presiden yang mempunyai program untuk memperbaiki sistem penggajian di Polri dan Kejaksaan Agung secara sungguh-sungguh, saya tidak ragu untuk memilihnya. Bagaimana dengan Anda?

Artikel ini telah di-publish melalui Kompasiana dengan link sbb:

https://www.kompasiana.com/shariyadin/6470155e4addee43d61fc5b2/jangan-biarkan-polisi-menanggung-dosa-sendirian?page=3&page_images=1